



Bali Susun Riparda 2014-2029

## Abaikan Perpres Reklamasi

**"Tentu kontradiktif dengan penetapan kawasan pariwisata di Tanjung Benoa. Secara geografis kawasan Tanjung Benoa memiliki laut Nusa Dua dan Teluk Benoa. Tentu yang bisa dilakukan Tanjung Benoa adalah mengembalikan situasi dari Teluk Benoa tersebut."**

**A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T.  
Sekretaris Pansus Riparda**

RENCANA Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Riparda) Provinsi Bali Tahun 2014-2029 kini sedang digodok untuk menjadi peraturan daerah. Riparda yang nantinya akan menentukan nasib ekonomi Bali selama 15 tahun dari sektor pariwisata, rupanya mengabaikan bahkan bertentangan dengan Perpres No.51 Tahun 2014 yang lebih dikenal dengan Perpres Reklamasi.

"Tentu kontradiktif dengan penetapan kawasan pariwisata di Tanjung Benoa. Secara geografis kawasan Tanjung Benoa memiliki laut Nusa Dua dan Teluk Benoa. Tentu yang bisa dilakukan

Tanjung Benoa adalah mengembalikan situasi dari Teluk Benoa tersebut," ujar Sekretaris Pansus Riparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. usai menggelar Rapat Pembahasan Ranperda Provinsi Bali tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2029, Senin (20/4) kemarin.

Adhi menjelaskan, pertentangan antara Riparda dengan Perpres 51 berada dalam batang tubuh dan penjelasan. Di sana dinyatakan bahwa kawasan pariwisata dan daya tarik wisata hanya bisa direvitalisasi pengembangannya dengan mengembalikan sesuai dengan kondisi semula. Selain itu, Perpres 51 juga dikatakan kontradiktif dengan Perda RTRWP Bali yang dijadikan lampiran terkait peta pariwisata.

"Oleh karena itu, Pansus menyepakati untuk bertanya kepada Presiden melalui konsultasi dulu dengan Kementerian Pariwisata karena hubungannya adalah kontradiktif antara perda, perpres, dan undang-undang. Kecuali daerah Tanjung Benoa dicabut dari kawasan pariwisata. Maka dia tidak kontradiktif dengan perpres itu," tandasnya.

**Hal. 23  
Pariwisata Bali**

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

### Pariwisata Bali

#### Dari Hal. 1

Adhi menambahkan, pertentangan antara perpres dan riparda juga bisa dihindari jika Perpres 51/2014 dikembalikan lagi menjadi Perpres No.45 Tahun 2011. Selain persoalan kontradiktif, pihaknya juga mengingatkan Dinas Pariwisata Bali agar memasukkan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya ke dalam tor "mengingat".

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Bali A.A. Gede Yuniartha Putra, S.H., M.H. mengatakan, riparda nantinya untuk mengembangkan bagaimana pariwisata Bali ke depan. Termasuk akan ada program destinasi wisata mana saja yang bisa dikembangkan, setelah riparda resmi menjadi perda.

Teluk Benoa

Sementara itu sejumlah elemen, Senin kemarin, mendatangi gedung DPRD Bali. Mereka mendukung Teluk Benoa untuk direvitalisasi berbasis reklamasi.

Ketika menerima perwakilan demo, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menugaskan Pansus Arahana Peraturan Zonasi (APZ) segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Konsultasi ini untuk meminta kepastian apakah Perpres No.51 Tahun 2014 akan dilanjutkan atau dibatalkan.

"Kalau ini dilanjutkan, otomatis akan masuk di dalam Perda Zonasi karena perda ini tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Kalau itu dicabut, itulah masalahnya. Kita tidak bisa bertentangan dengan aturan yang di atasnya," ujarnya di hadapan kelompok masyarakat pro-reklamasi.

Politisi Partai Golkar ini me-

nambahkan, Pansus APZ juga ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera dilakukan proses amdal dengan melibatkan para ahli profesional yang independen. Kalau amdal sudah disusun dan hasilnya positif untuk Bali, maka tidak ada lagi alasan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

"Tetapi kalau hasil amdal oleh tim independen yang profesional itu menyatakan tidak layak, maka kita pun harus menerima dengan besar hati," tandasnya.

Terkait tugas ini, Ketua Pansus APZ Kadek Diana mengaku akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas kelanjutan Perpres No.51 Tahun 2014. Koordinasi kemungkinan dilakukan akhir bulan ini atau awal bulan Mei mendatang. (kmb32)

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : \_\_\_\_\_



Dari Evaluasi Triwulan I Program Pembangunan Denpasar

## Program Pembangunan Diarahkan untuk Kesejahteraan Masyarakat

PENINGKATAN jumlah tender barang dan jasa yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar pada triwulan I tahun ini, meningkat tajam dari triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang semakin baik, dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan lebih awal sehingga angka untuk tender triwulan I ini telah mencapai 120. Sebagian besar program-program pembangunan di Kota Denpasar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian terungkap pada rapat evaluasi triwulan I pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Denpasar tahun 2015 dengan percepatan realisasi program atau kegiatan APBD 2015, Senin (20/4) kemarin di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar. Rapat evaluasi ini dihadiri Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara beserta seluruh pimpinan

SKPD Pemkot Denpasar.

Dalam rapat tersebut, juga diungkapkan capaian dari masing-masing SKPD lebih baik dari tahun sebelumnya, yang rata-rata hampir mencapai 20 persen dari target tahunan. Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengharapkan, dalam mencapai target-target tersebut sebagai hal penting. Namun, sangat baik apabila pencapaian tersebut dilandasi dengan pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta dapat dipadukan dengan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan skala prioritas.

Kemudian dalam pelaksanaannya, tetap dilakukan monitoring dan pengawasan yang baik. Sehingga, sejak dini dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan atau penyesuaian dan hasil yang dicapai dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

arti luas. Jika sejak perencanaan dapat dilakukan secara cermat dan dalam pelaksanaannya diawasi dengan baik, Wali Kota Rai Mantra yakin hasilnya akan menjadi baik pula dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menambahkan, untuk dapat melakukan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat, di samping bersandar kepada aturan perundang-undangan, juga harus mengedepankan konsep 3S, 3K, 1E. Yakni Senyum, Sopan, Sungguh-sungguh, Ketelitian, Ketepatan, dan Kecepatan yang terakhir harus terus dilakukan Evaluasi. Dengan demikian, apa yang dikerjakan benar sesuai aturan, baik dari segi kesopanan, etika dan budaya masyarakat Bali. Maka, kepuasan masyarakat tidak sebatas selesai dilayani, tetapi juga dapat memberikan citra atau *image* bahwa Denpasar merupakan Kota Budaya. (ad1709)



EVALUASI - Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Sekda Kota Denpasar dan Asisten I Ketut Mister dan Asisten II Jimmy Sidartha pada pelaksanaan evaluasi triwulan I program kegiatan pembangunan Kota Denpasar tahun 2015 dengan percepatan realisasi program atau kegiatan APBD 2015, Senin (20/4) kemarin di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar.

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 2



## Pembangunan Gedung Radiologi Dianggarkan Rp 7,239 Miliar

Semarapura (Bali Post) -

RSUD Klungkung merencanakan pembangunan gedung baru seharga Rp 7,239 miliar. Anggaran miliaran tersebut direncanakan untuk membangun gedung Radiologi berlantai dua. Saat ini pelayanan radiologi masih menumpang di gedung unit II yang sebelumnya diperuntukkan sebagai poliklinik umum.

Kabid Pengkajian dan Pengembangan RSUD Klungkung dr. I Nyoman Kesuma, M.Ph. mengungkapkan, pembangunan gedung radiologi di RSUD Klungkung menjadi prioritas karena pelayanan radiologi masih meminjam gedung unit II yang sebelumnya diperuntukkan sebagai poliklinik umum. "Sejak 2012 pelayanan radiologi dipindah ke Gedung Unit II yang dulu sebagai ruang Poliklinik Umum. Itu dialihfungsikan," ujarnya, Senin (20/4) kemarin.

Kabid Pelayanan RSUD Klungkung dr. I Wayan Swatama, M.Kes. menambahkan, sebenarnya gedung radiologi ini sudah direncanakan dibangun tahun 2014. Saat itu, perencanaan gedung selesai Juni 2014. Dengan waktu pengerjaan yang dibutuhkan selama sembilan bulan, maka pihaknya meminta pengerjaan diundur di tahun 2015. "Waktu pengerjaan sembilan bulan tidak

mungkin bisa diselesaikan di akhir tahun saat itu," jelasnya.

Pembangunan gedung tersebut dianggarkan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali sebesar Rp 3,225 miliar dan APBD Kabupaten Klungkung 4,074 miliar. Direncanakan anggaran tersebut digunakan untuk membangun gedung dua lantai. Lantai satu nantinya akan digunakan sebagai Radiologi yang juga melayani CT-Scan dan USG. Sedangkan lantai dua akan digunakan untuk ruang operasi darurat.

Gedung radiologi yang dimiliki sebelumnya, menurut Wayan Swatama, dibangun tahun 80-an sehingga sudah tidak memadai untuk pelayanan radiologi. Saat perluasan gedung UGD, gedung radiologi tersebut akhirnya dihancurkan dan kini masih menunggu pengerjaan gedung yang baru.

Pihaknya mengakui sampai saat ini masih banyak gedung tahun 80-an yang masih digunakan. Hal ini pun banyak dikeluhkan masyarakat karena banyak ruang yang sudah lapuk dan rusak. Pihaknya kini sedang menyiapkan perencanaan Blog gedung untuk mengetahui bangunan yang mana bisa dibongkar dan dibangun baru tanpa mengganggu pelayanan. (dwa)

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 16



Tertunda Setahun

# Seluruh Fraksi Minta Ranperda Perlindungan Lahan Dilanjutkan

Negara (Bali Post) -

Enam fraksi di DPRD Jembrana meminta eksekutif membahas dan mengambil keputusan terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) yang sempat tertunda setahun. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (20/4) kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Sugiasa dan dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Muspida, anggota DPRD dan jajaran Pemkab ini, seluruh fraksi meminta agar Ranperda PLPPB itu harus dilanjutkan. Fraksi Kebangkitan Nasional melalui I Ketut Suardika menyoroti masih adanya tunggakan tiga ranperda di antaranya Ranperda PLPPB yang merupakan inisiatif DPRD agar segera dibahas dan diambil keputusan akhir.

"Kami yakin dan percaya bahwa semua pemangku kepentingan terutama pembuat kebijakan baik DPRD maupun Bupati memiliki persepsi yang sama bahwa regulasi ini disusun untuk kebaikan masyarakat yang kita cintai," terang kader muda Partai NasDem asal Asahduren, Pekutatan ini. Pihaknya juga meminta SKPD yang berkaitan langsung dengan Ranperda tertunda itu untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sehingga tidak menghambat lagi pembahasan ranperda.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi Demokrat Sejahtera (F-DS), PDI Perjuangan dan Golkar. Pandangan umum FDS dan F-PDI Perjuangan yang dibacakan Putu Kamawijaya dan Ni Putu Lilyana menganggap Ranperda PLPPB sangat diperlukan. Kebutuhan ketersediaan pangan meningkat setiap tahun mengikuti jumlah penduduk.

Luasan lahan pertanian yang makin berkurang akibat beralih fungsi dikhawatirkan juga berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. "Kendala dalam penetapan Ranperda ini agar diselesaikan dengan cepat melalui pendataan dan sosialisasi serta koordinasi dengan kementerian terkait," tandas Kamawijaya. Guna memproteksi sementara hingga ditetapkannya Perda, F-DS meminta Bupati menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Lilyana dari F-PDI Perjuangan mengatakan swasembada pangan telah menjadi program utama pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung untuk kedaulatan pangan dan negara. Hambatan yang ada agar dicarikan solusinya dan meminta kerja sama semua pihak khususnya Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk menyampaikan data luas lahan pertanian yang pasti kepada DPRD dan

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 14



Sambungan - .



Bali Post/olo

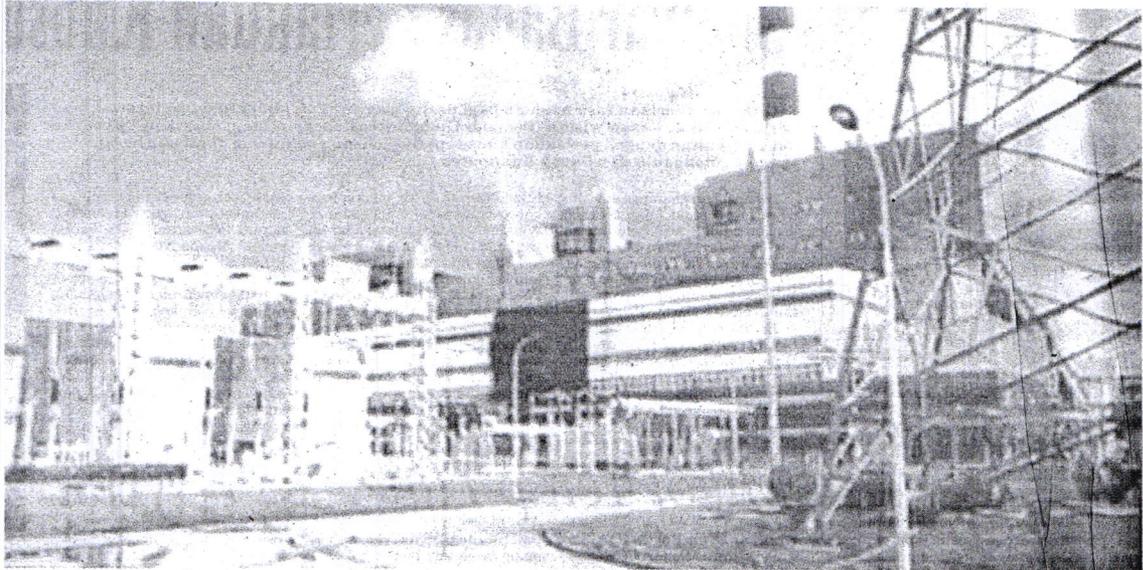
**RANPERDA - Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional I Ketut Suardika menyerahkan pemandangan umum terkait Ranperda yang diajukan eksekutif kepada Bupati Jembrana.**

segera melakukan sosialisasi kepada petani. F-PDI Perjuangan juga sepakat adanya Perbup untuk mengatur alih fungsi lahan.

Keinginan yang sama agar

Ranperda yang tertunda ini segera diputuskan juga disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Sehingga dari enam fraksi yang ada, semuanya meminta agar Ran-

perda inisiatif dewan ini dan dua ranperda yang diajukan eksekutif yakni Perubahan Retribusi Jasa Umum dan Ranperda Radio Pemkab juga segera dibahas. (kmb26)



UJI COBA - PLTU di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak memasuki masa uji coba pengoperasian mesin pembangkit.

## Uji Coba Pengoperasian PLTU Investor Diminta Taati Dokumen Amdal

Singaraja (Bali Post) -

Tidak hanya Komisi II DPRD Buleleng yang mengawasi masa uji coba pengoperasian mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Celukan Bawang, Gerokgak. Kini giliran Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. dengan tegas meminta agar PT General Energy Bali (GEB) untuk berpatokan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang sudah disusun. Pemerintah daerah tidak ingin ada dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, pascapengoperasian PLTU ini.

Bupati Putu Agus Suradnyana, S.T. yang didampingi Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, S.P.Og. dan Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna Senin (20/4) kemarin, mengatakan, sejak megaproyak tersebut mulai dikerjakan, pihaknya tetap mengingatkan indikasi pencemaran lingkungan di sekitar pembangkit itu bisa diatasi dengan sebaik mungkin. Bahkan, kala itu dokumen amdal yang sudah diterbitkan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali pun sempat diminta ditinjau ulang. Hal ini karena persoalan pencemaran lingkungan dari pembangkit ini menjadi hal yang sangat krusial dan jika tidak ditangani

dengan baik bisa saja memunculkan persoalan dan polemik di kalangan masyarakat. "Saya ingin investor itu tetap pada komitmennya dan tetap PLTU itu mengacu pada amdal yang sudah ada," katanya.

Sementara itu disinggung soal kontribusi untuk daerah, bupati menolak berkomentar panjang terhadap hal itu. Dia mengatakan, berkaitan kontribusi itu tetap akan menjadi target dan segera diagendakan untuk membahasnya bersama dewan dan pihak investor. "Soal itu saya belum ada komentar dan yang pasti akan ada pembahasan nanti pasti kita bicarakan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelum-

nya, PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak mulai melakukan tahap uji coba pengoperasian mesin pembangkit. Jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT PLN (Perseor) sudah terkoneksi ke jaringan di PLTU.

Sementara itu, hasil pengamatan DPRD beberapa waktu lalu menemukan munculnya getaran termasuk suara bising, dan kepulan asap dari mesin pembangkit. Dewa mendesak agar investor segera melakukan penanganan gangguan lingkungan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga di sekitar pembangkit. (kmb38)

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 12